

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian Jejaring Antar Organisasi (*Inter-Organizational Network*) Pada Pemerintah Daerah Pelalawan Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola Jejaring antar organisasi pada pemerintah daerah kabupaten Pelalawan, dilihat dari struktur organisasi, koordinasi antar organisasi, konsistensi program, dan perencanaan dan operasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih mengalami beberapa kendala, antara lain:
 - a. Struktur Organisasi, kendala yang dihadapi:
 - Berbentuk Hybrid (campuran/fungsional-divisional) , struktur organisasi (Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan) bersifat sementara (*ex officio*) sehingga sistem kerjanya insidental.
 - Dikarenakan tim posko merupakan gabungan dari beberapa dinas maka dapat lebih fleksibel, namun wewenang dan peran masing-masing dinas belum dijalankan.
 - Terdapat tiga kepala yang berperan dalam menangani kebakaran lahan dan hutan: Pengarah, Kepala, dan Ketua Tim yang seharusnya bekerja

sesuai bidang, namun faktanya semua masih bekerja untuk pemadaman saja.

- b. Koordinasi Antar Organisasi, kendala yang dihadapi;
 - Koordinasi hanya bersifat *share* informasi saja saat terjadi kebakaran lahan dan hutan.
 - Koordinasi antar organisasi belum sampai pada tahap pencegahan dan tahap pemulihan pasca kebakaran lahan dan hutan.
 - Anggota dalam jejaring masih membawa kedinasan masing-masing pada saat menangani kebakaran lahan dan hutan (ego sektoral).
- c. Konsistensi Program, kendala yang dihadapi:
 - Program pengendalian karhutla belum konsisten dijalankan secara keseluruhan (pencegahan, pemadaman, dan pemulihan).
 - Tim Posko Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan tidak memiliki mata anggaran secara mandiri sehingga program pengendalian kebakaran lahan dan hutan tidak sampai pada tahap pencegahan dan pemulihan.
- d. Perencanaan dan Operasional kendala yang dihadapi:
 - Prosedur perencanaan tidak tergambarkan dengan jelas karena Posko kebakaran lahan dan hutan sifatnya hanya insidental saja.

- Sampai dengan saat ini tidak memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku untuk digunakan dalam menangani kebakaran lahan dan hutan

2. Faktor penentu jejaring organisasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau hasilnya masih belum dapat dioptimalkan.

Hal ini dapat dilihat dari simpulann hasil lapangan berikut ini:

- a. Regulasi terkait panduan teknis penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya dijalankan.
- b. Lingkungan politik; dukungan dari pemilik otoritas, (terkait regulasi dan anggaran) masih kurang di tingkat DPRD Kabupaten Pelalawan, sehingga jejaring antar organisasi belum dapat terintegrasi dengan maksimal.
- c. Lingkungan sosial dan budaya; membuka lahan baru dengan jalan melakukan pembakaran sudah menjadi tradisi di masyarakat, dan Perusahaan (Korporasi) yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam skala besar.
- d. Kualitas sumber daya manusia yang menangani pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan masih belum maksimal sebab belum sampai pada pencegahan dan pemulihan.
- e. Sarana prasarana belum cukup memadai untuk melakukan pembaharuan dan perawatan berkala.
- f. Anggaran; rendahnya mata anggaran program pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang disetujui oleh DPRD kabupaten Pelalawan

3. Untuk itu dalam pelaksanaannya peneliti memberikan usulan model *work with and within network*, bekerja secara jejaring dan di dalam jaringan, yang ditandai dengan struktur yang jelas sehingga tupoksi pun jelas, koordinasi yang sinergisi, perbantuan sumber daya, dan kegiatan operatif bersama. Aktor-aktor utama dalam jejaring (seperti: BPBD, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Satpol PP dan Damkar, dan Dinas Lingkungan Hidup) sudah saling mengenal dalam jangka waktu yang cukup lama serta sudah bekerjasama secara diadik/triadik. Dengan demikian untuk selanjutnya, akan semakin kecil gap struktural dan kulturalnya. Sehingga pembagian tugas, wewenang, penyesuaian program di antara instansi (*cross-programs adjustments*) dapat terintegrasi dengan baik. Modalitas penting, yakni konsensus, kepercayaan, dan sinergi menjadi kunci keberhasilan jejaring antar organisasi.

6.2 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil-hasil penelitian disertasi ini memiliki dua macam implikasi, yakni implikasi teoritis dan implikasi praktis.

6.2.1. Implikasi Teoritis

Hasil-hasil temuan penelitian disertasi ini menguatkan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya tentang jejaring antar organisasi dan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang diperkuat oleh penelitian ini adalah hasil penelitian dari Erly Sukrismanto, dkk. (2010;2012)

dan Eko Priyo Purnomo, dkk. (2016). Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melengkapi kajian manajemen publik dalam ruang lingkup administrasi publik.

Hasil penelitian ini, yakni pada ranah manajemen publik dapat berguna bagi penelilitain selanjutnya, yang memfokuskan kajian pada bidang jejaring antar organisasi (*interorganizational network*). Dalam keyakinan peneliti, penerapan operasional konsep *work in and within network* dapat membuka peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai perkembangan paradigma administrasi publik modern. Hasil penelitian ini masih memiliki celah-celah kelemahan. Dan oleh sebab itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut dari para peneliti lain diharapkan dapat memperbaikinya lebih baik lagi.

6.2.2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis hasil-hasil penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hasil dan kajian dalam penelitian ini mendorong wacana (isu) *problem recognition* bagi stakeholder pengambil dan penentu kebijakan di kabupaten Pelalawan untuk menyadari bahwa permasalahan kebakaran lahan dan hutan di daerahnya merupakan potensi kerawanan yang bersifat *given* karena keberadaan sebaran lahan gambut di wilayahnya. Dan sekaligus memberi risiko ekologis jangka panjang bagi kabupaten Pelalawan. Dan oleh sebab itu, langkah-langkah startegis bervisi dan bermisi jangka panjang selayaknya mulai diinisiasi.
2. Permasalahan kebakaran lahan dan hutan memiliki potensi skala dampak yang luas (lokal, regional, nasional, trans-nasional). Pengendalian karhutla tidak bisa

lagi dihadapi secara parsial atau reaksional-insidental. Banyak pihak (multi-agensi/aktor) terlibat dalam kerja pengendalian karhutla. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pola-pola dan cara kerja koordinatif, kooperatif, dan kolaboratif yang memungkinkan *joint program*, *joint action*, dan pelibatan berbagai pihak secara sinergis-intergratif selayaknya dapat ditumbuhkembangkan.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan observasi lapangan dan kajian yang dilakukan peneliti terhadap permasalahan kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan, peneliti merekomendasi poin-poin berikut ini.

1. Harus dilakukan perubahan struktur organisasi Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan, sehingga jika struktur organisasi tersusun dengan jelas dan sistematis, maka tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi menjadi lebih jelas. Pembagian tugas yang jelas terkait penanggung jawab pencegahan karhutla, pemadaman karhutla, sampai pada pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan harus dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan membuat Perda tentang Penanggualangan Karhutla dengan mengacu pada Perda Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karahutla.

3. Memprioritaskan program pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pelalawan, mulai dari pencegahan, pemdaman, hingga pemulihan pasca kebakaran.
4. Pemerintah Daerah mensosialisasikan secara massif pembukaan lahan dengan cara membakar tidak membakar (metode tanpa bakar/*zero burning*).
5. Melakukan atau memberikan Bimtek kepada SDM yang menangani pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pelalawan, mulai dari tahap pencegahan, pemdaman, hingga pemulihan pasca kebakaran.
6. Melengkapi, memperbaiki, dan melakukan perawatan untuk sarana prasarana yang digunakan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan.
7. Meningkatkan anggaran program pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan.

6.4. Keterbatasan Penelitian.

Dikarenakan keterbatasan peneliti maka dalam penelitian ini dipilih dua fenomena penelitian yaitu Pola Jejaring antar organisasi dan Faktor penentu pola jejaring organisasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dua fenomena tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan merupakan pokok permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini hanya sebatas menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan uji validitas data yaitu memakai Triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan (*Cross check*) data dan fakta ketika peneliti berada di lapangan. Sedangkan dengan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu *in depth-interview*, observasi, dan melakukan dokumentasi pada saat peneliti berada di lapangan. Sehingga dengan adanya keterbatasan penelitian ini, dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang lain untuk mengembangkan fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi lain.